



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.40-6/99  
Sifat : Penting  
Lampiran : 10 (sepuluh) naskah  
Perihal : Contoh format Keputusan Pengalihan PNS

Jakarta, 18 April 2016

Kepada  
Yth.  
Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN  
di  
Tempat

1. Menindaklanjuti hasil workshop penyamaan persepsi dalam rangka penyelesaian permasalahan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagai dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, dengan ini disampaikan contoh format keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai pelaksanaan pengalihan dimaksud (terlampir).
2. Untuk memperlancar dan mempercepat penetapan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungannya untuk menandatangani keputusan pengalihan dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
BIMA MARIA WIBISANA

Tembusan:

1. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian; dan
2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian.

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Kabupaten/Kota (Pengawas  
Ketenagakerjaan)  
Ke Provinsi yang ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Regional BKN**



Lampiran  
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : K.26-30/V.40-6/99  
Tanggal : 18 April 2016  
Perihal : Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL ...**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2015;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama :
  2. NIP :
  3. Tempat, tanggal lahir :
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
  5. Jabatan Terakhir :
  6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi .....
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA KANTOR REGIONAL ...  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur.....;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Kabupaten/Kota (Guru dan Tenaga  
Kependidikan) Ke Provinsi yang ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Regional BKN**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL ...**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
5. Jabatan Terakhir :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi .....

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA KANTOR REGIONAL ...  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur.....;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Kabupaten/Kota (bidang Kehutanan) Ke  
Provinsi yang ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Regional BKN**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL ...**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang kehutanan kabupaten/kota selain pengelolaan taman hutan raya (Tahura) kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan kabupaten/kota selain pengelolaan taman hutan raya (Tahura) kabupaten/kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota Selain Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama :
  2. NIP :
  3. Tempat, tanggal lahir :
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
  5. Jabatan Terakhir :
  6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi .....
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA KANTOR REGIONAL ...  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur.....;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Kabupaten/Kota Ke BKKBN**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor .....

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana yang semula menjadi urusan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016;

- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
5. Jabatan Terakhir :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

.....,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ke Kementerian Perhubungan**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor .....

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan yang semula menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2016;

- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
5. Jabatan Terakhir :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

.....,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur.../Bupati.../Walikota....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Kabupaten/Kota (bidang Perhubungan) Ke  
Provinsi yang ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Regional BKN**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL ...**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2016;

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
5. Jabatan Terakhir :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi .....

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA KANTOR REGIONAL ...  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur.....;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor .....

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang semula menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah pusat sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama :
  2. NIP :
  3. Tempat, tanggal lahir :
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
  5. Jabatan Terakhir :
  6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

.....,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Gubernur..../Bupati..../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....

**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Provinsi (metrologi legal) Ke  
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Regional BKN**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL ...**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal yang semula menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan metrologi legal menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang Melaksanakan Metrologi Legal yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
5. Jabatan Terakhir :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.....

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA KANTOR REGIONAL ...  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur.....;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama :
  2. NIP :
  3. Tempat, tanggal lahir :
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
  5. Jabatan Terakhir :
  6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

.....,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Gubernur..../Bupati..../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....

**Contoh Format Keputusan Pengalihan PNS  
Kabupaten/Kota (bidang Energi dan Sumber  
Daya Mineral) Ke Provinsi yang ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Regional BKN**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL ...**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor .....**

**KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Daerah Provinsi..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama :
  2. NIP :
  3. Tempat, tanggal lahir :
  4. Pangkat/Gol ruang/TMT :
  5. Jabatan Terakhir :
  6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi .....
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA KANTOR REGIONAL ...  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur.....;
2. Bupati...../Walikota.....;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
4. Peringgal.

.....  
**NIP.** .....